



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2026

KEPALA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



ARIE PRIMAJAYA, S.E., M.Si  
NIP. 19751231 200312 1 007

# Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis : **Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi**

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

a. Persentase pertumbuhan koperasi, Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Koperasi Tahun 2025} - \text{Jumlah Koperasi Tahun 2024}}{\text{Jumlah Koperasi Tahun 2024}} \times 100\%$$

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 4 (empat) Program, yakni Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar **7,25%**; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi **8,06%**. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 111,23%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 3,33% terjadi peningkatan sebesar 241,94%.

2. Capaian sasaran strategis : **Meningkatnya Pertumbuhan UKM**

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

Persentase Pertumbuhan UKM, Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2025} - \text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2024}}{\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2024}} \times 100\%$$

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni Program Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar **28,20%**; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi **28,25%**. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,17%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 28,11% terjadi peningkatan sebesar 100,48%.

3. Capaian sasaran strategis : **Meningkatnya Kualitas SDM KUKM**

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang bersertifikat}}{\text{Jumlah SDM KUKM seluruhnya}} \times 100\%$$

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar **0,152%**; sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi **0,156%**. Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 102,86%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 0,325% terjadi penurunan sebesar 48,00%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Data UMKM yang tersedia belum maksimal
2. Adanya Refocusing anggaran yang mempengaruhi operasional pekerjaan, sehingga berdampak kepada capaian kinerja

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Pohon Kinerja .....	1
1.2 <i>Cascading</i> Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan .....	5
1.4 Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja) .....	7
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	7
<b>BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	11
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	12
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025 .....	14
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	16
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	16
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	21
<b>BAB 3 Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>22</b>
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	22
3.2 Efisiensi Anggaran.....	40
3.3 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 .....	42
3.4 Inovasi .....	44
3.5 Penghargaan.....	44
3.6 Crosscutting.....	44
<b>BAB 4 Penutup .....</b>	<b>45</b>
4.1 Kesimpulan .....	45
4.2 Rekomendasi .....	45
4.3 Rencana Aksi.....	46

## Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	8
Tabel I.2 Sarana-Prasarana .....	9
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025 .....	10
Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026 .....	12
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	12
Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 .....	14
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025.....	17
Tabel II.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025.....	18
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025.....	19
Tabel II.7 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 .....	20
Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	22
Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	23
Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	24
Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 .....	24
Tabel III.5. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	32
Tabel III.6. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	32
Tabel III.7. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	38
Tabel III.8. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	38
Tabel III.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025 .....	41
Tabel III.10 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	43

## Daftar Gambar

Gambar I.1 Pohon Kinerja .....	2
Gambar I.2 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	3
Gambar I.3 Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi Dan UKM.....	4
Gambar I.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM.....	5
Gambar I.5 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Kopeasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	6
Gambar III.1 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.....	27
Gambar III.2 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	28
Gambar III.3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi .....	29
Gambar III.4 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi .....	30
Gambar III.5 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi .....	31
Gambar III.6 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.....	34
Gambar III.7 Program Pengembangan UMKM Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dngan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah .....	37
Gambar III.8 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi .....	40

# BAB I

## Pendahuluan

### **Bab I berisi :**

1. *Pohon Kinerja PD*
2. *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung - jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

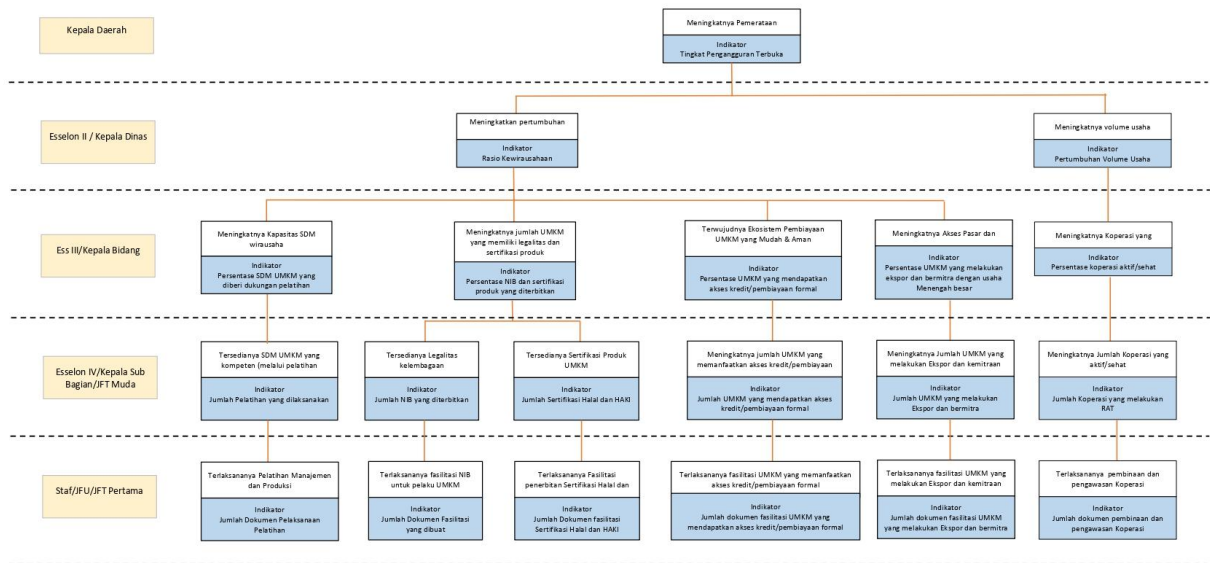
### **1.1 Pohon Kinerja**

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja. Di dalam pohon kinerja kita dapat melihat crosscutting kaitan/hubungan dengan Instansi Lain baik itu instansi vertikal maupun antar perangkat daerah.

Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (logic model) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis

proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan. Pohon Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

**Gambar I.1 Pohon Kinerja**



Ket : pohon kinerja lengkap dapat dilihat melalui link :

### 1.2 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:



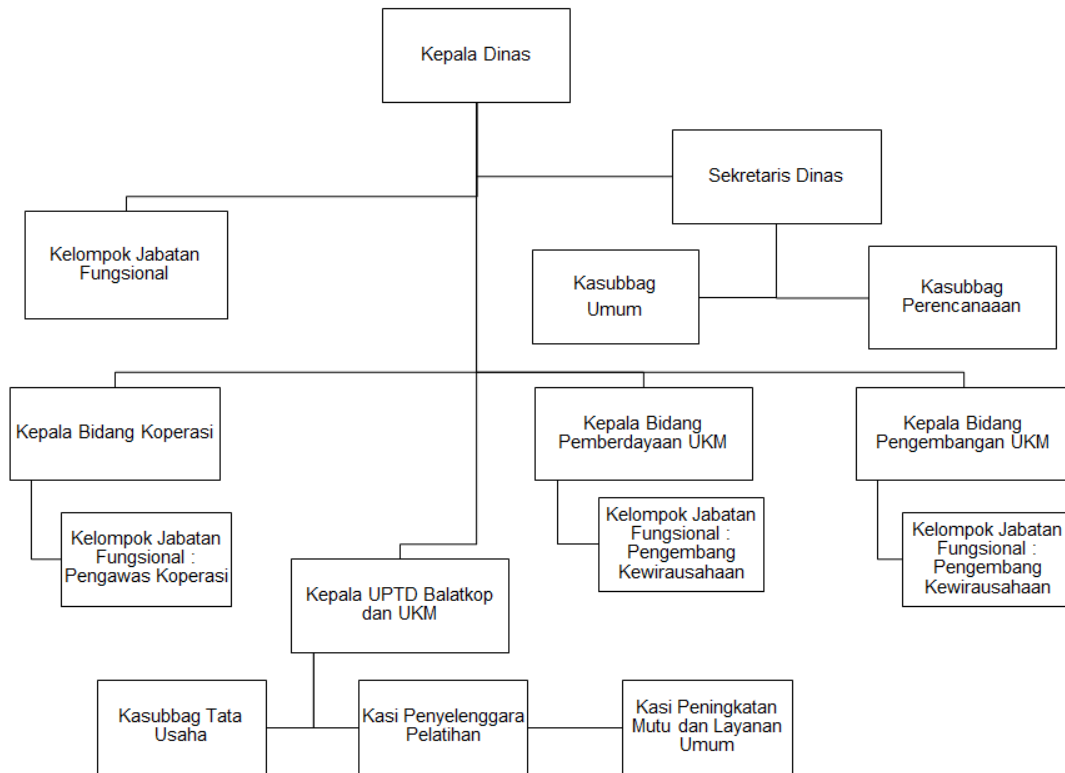
**Gambar I.3** Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi Dan UKM

**IDENTIFIKASI PETA PROSES**

PETA PROSES (KODE)	SUB PETA PROSES		STRATEGI PROGRAM		PETA LINTAS FUNGSI	
	KODE	SUB PETA PROSES	PROGRAM	KODE	CFM	BIDANG
<b>Meningkatnya pertumbuhan Volume Usaha KUKM (DKUKM01)</b>	<b>DKUKM.02.01</b>	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	<b>DKUKM.02.01.CFM.04</b>	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<b>BIDANG KOPERASI</b>
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	<b>DKUKM.02.01.CFM.05</b>	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<b>BIDANG KOPERASI</b>
			Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	<b>DKUKM.02.01.CFM.06</b>	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<b>BIDANG KOPERASI</b>
	<b>DKUKM.02.02</b>	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Kecil	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	<b>DKUKM.02.02.CFM.07</b>	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL</b>
			Peningkatan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	<b>DKUKM.02.02.CFM.08</b>	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	<b>BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KECIL</b>
	<b>DKUKM.02.03</b>	Meningkatnya Kualitas SDM KUKM	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	<b>DKUKM.02.03.CFM.09</b>	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<b>BALAI LATIHAN KOPERASI</b>

Ket : Peta Proses Bisnis lengkap dapat dilihat melalui link :

**Gambar I.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM**



Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/2222/VI/2023  
Tentang Peta Jabatan pada Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### 1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

**Gambar I.5 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Adapun Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.4 Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja)**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja”, dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya kapasitas SDM pengelola Koperasi dan UKM
2. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman SDM KUKM
3. Rendahnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja K-UKM
4. Rendahnya ketersediaan dan akurasi data KUKM
5. Rendahnya kapabilitas K-UKM dalam mendapatkan akses pembiayaan permodalan

#### **1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran**

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN						JUMLAH	PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN		
		JUMLAH	KUALIFIKASI						JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1	D3	SMA/SMP			S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		
<b>A</b>	<b>JABATAN STRUKUTRAL</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	
1	Eselon II	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	
2	Eselon III	5	1	3	1	0	0	5	1	3	1	0	0	4	1	
3	Eselon IV	5	0	2	3	0	0	5	0	2	3	0	0	4	1	
<b>B</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	
1	Ahli Madya	4	0	0	4	0	0	2	0	1	1	0	0	2	0	
2	Ahli Muda	11	0	0	11	0	0	10	0	4	6	0	0	6	4	
3	Ahli Pertama	14	0	0	14	0	0	3	0	0	3	0	0	1	2	
4	Terampil	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	
<b>C</b>	<b>JABATAN PELAKSANA</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	
<b>D</b>	<b>PPPK</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	
1	PPPK Fungsional	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	
2	PPPK Penuh Waktu	8	0	0	0	1	7	8	0	0	0	1	7	3	5	
3	PPPK Paruh Waktu	58	0	0	0	0	58	58	0	0	0	0	58	34	24	

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 71 orang (60,68%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 28 orang (23,93%), S2 sebanyak 11 orang (9,40%), D3 sebanyak 6 orang (5,13%) dan S3 sebanyak 1 orang (0,85%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

**Tabel I.2 Sarana-Prasarana**

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
<b>1</b>	<b>Tanah</b>	<b>1</b>	<b>304.380.541,00</b>
	tanah	1	304.380.541,00
<b>2</b>	<b>Peralatan dan mesin</b>	<b>463</b>	<b>6.046.270.481,00</b>
	alat besar	-	-
	alat angkutan	13	1.207.122.500,00
	alat bengkel dan alat ukur	-	-
	alat pertanian	1	5.267.467,50
	alat kantor dan rumah tangga	300	3.213.402.652,50
	alat studio, komunikasi dan pemancar	23	327.160.218,00
	alat kedokteran dan kesehatan	-	-
	alat laboratorium	-	-
	alat persenjataan	-	-
	komputer	120	1.250.821.643,00
	alat eksplorasi	-	-
	alat pengeboran	-	-
	alat produksi, pengolahan dan pemurnian	-	-
	alat bantu eksplorasi	-	-
	alat keselamatan kerja	6	42.496.000,00
	alat peraga	-	-
	peralatan proses/produksi	-	-
	rambu – rambu	-	-
	peralatan olah raga	-	-
<b>3</b>	<b>Gedung dan bangunan</b>	<b>11</b>	<b>15.461.618.496,00</b>
	bangunan gedung	9	14.780.429.298,00
	monumen	-	-
	bangunan menara	-	-
	tugu titik kontrol/pasti	2	681.189.198,00
<b>4</b>	<b>Jalan, irigasi dan jaringan</b>		<b>805.105.000,00</b>
	jalan dan jembatan	1	198.500,000
	bangunan air	4	406.900.000,00
	instalasi	3	172.286.000,00
	jaringan	23	27.419.000,00
<b>5</b>	<b>Aset tetap lainnya</b>	<b>128</b>	<b>9.997.500,00</b>

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
	bahan perpustakaan	128	9.997.500,00
	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	-	-
	hewan	-	-
	biota perairan	-	-
	tanaman	-	-
	barang koleksi non budaya	-	-
	aset tetap dalam renovasi	-	-
<b>6</b>	<b>Konstruksi dalam pengerjaan</b>	<b>2</b>	<b>138.423.350,00</b>
	konstruksi dalam pengerjaan	2	138.423.350,00
<b>7</b>	<b>dll.</b>		
	<b>Total</b>		

Kendaraan operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 3 unit kendaraan operasional, dan 9 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 44 : 116 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Hanya saja sebanyak 34% dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000-an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak mendukung tuntutan pekerjaan yang 90% berbasis IT.

**Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025**

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
<b>2024</b>	<b>17.781.827.828,-</b>	<b>75.197.100,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>17.857.024.928,-</b>
<b>2025</b>	<b>20.937.125.004,-</b>	<b>1.091.930.500,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>22.029.055.504,-</b>

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 dibanding tahun 2024 terdapat kenaikan Total anggaran belanja sebesar Rp 4.172.030.576,-. Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## BAB 2

# Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026.

Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

### 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatkan Kesempatan Kerja (Sasaran RPD yang diampu PD). Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah “Meningkatnya Kesempatan Kerja”.

Adapun sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

**Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi	%	10,61%	17.65%	18,15%	19,01%	19,53%	17.65%	
2.	Meningkatnya pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM	%	17,24%	0.53%	0.53%	0.56%	0.59%	0.61%	
3.	Meningkatnya kualitas SDM KUKM	Persentase SDM KUKM yang berkualitas	%	21,69%	0.304%	0.304%	0.325%	0.347%	0.369%	
4.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	%	80,00%	80,50%					
		Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah		81.06	78.00	78.05	78.45	78.85	78.85	

Sumber : Renstra Perubahan Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi	<p>1.1. Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Perizinan Koperasi.</p> <p>1.2. Meningkatkan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian.</p> <p>1.3. Meningkatkan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi</p>	<p>1.1.1. Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Perizinan Koperasi.</p> <p>1.1.2. Meningkatkan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian.</p> <p>1.1.3. Meningkatkan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi</p>
2.	Meningkatnya pertumbuhan KUMKM	<p>2.1. Terlaksananya Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha</p> <p>2.2. Terlaksananya Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.</p> <p>2.3. Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Koperasi</p>	<p>2.1.1. Terlaksananya Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha</p> <p>2.2.1. Terlaksananya Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.</p> <p>2.3.1. Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Koperasi</p>

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2.4. Terlaksananya Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil. 2.5. Terlaksananya Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil. 2.6. Terlaksananya Peningkatan kualitas kewirausahaan	2.4.1. Terlaksananya Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil. 2.5.1. Terlaksananya Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil. 2.5.2. Terlaksananya Peningkatan kualitas kewirausahaan
3.	Meningkatnya kualitas SDM KUMKM	3.1. Terlatihnya SDM KUMKM bidang perkoperasian dan kewirausahaan. 3.2. Tercapainya target pendampingan 3.3. Terevaluasinya hasil pendampingan KUMKM pasca pelatihan 3.4. Meningkatnya Penerapan Mutu pelatihan KUMKM 3.5. Terlaksananya Penerapan Sistem manajemen mutu sesuai dengan standar ISO 9001 : 2015	3.1.1. Terlatihnya SDM KUMKM bidang perkoperasian dan kewirausahaan. 3.1.2. Tercapainya target pendampingan 3.1.3. Terevaluasinya hasil pendampingan KUMKM pasca pelatihan 3.1.4. Meningkatnya Penerapan Mutu pelatihan KUMKM 3.1.5. Terlaksananya Penerapan Sistem manajemen mutu sesuai dengan standar ISO 9001 : 2015

Sumber : Renstra Perubahan Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

### 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025**

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (RP)
1. Meningkatkan pertumbuhan Koperasi	<b>1.1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	<b>49.898.350</b>	<b>31.020.900</b>	<b>(18.877.450)</b>
	1.1.1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.898.350	31.020.900	(18.877.450)
	<b>1.2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>74.997.700</b>	<b>45.286.500</b>	<b>(29.711.200)</b>
	1.2.1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.997.750	32.686.600	(17.311.150)
	1.2.2. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	24.999.950	12.599.900	(12.400.050)
	<b>1.3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>157.999.900</b>	<b>30.685.050</b>	<b>(127.314.850)</b>
	1.3.1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	157.999.900	30.685.050	(127.314.850)
	<b>1.4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>717.101.700</b>	<b>642.655.350</b>	<b>(74.446.350)</b>
	1.4.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	717.101.700	642.655.350	(74.446.350)

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (RP)
2. Meningkatkan pertumbuhan UKM	<b>2.1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>3.879.958.800</b>	<b>3.335.970.350</b>	<b>(543.988.450)</b>
	2.1.1. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	3.879.958.800	3.335.970.350	(543.988.450)
	<b>2.2. Program Pengembangan UMKM</b>	<b>5.048.602.900</b>	<b>3.530.541.600</b>	<b>(1.518.061.300)</b>
	2.2.1. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	5.048.602.900	3.530.541.600	(1.518.061.300)
3. Meningkatkan Kualitas SDM KUKM	<b>3.1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>2.083.750.250</b>	<b>966.028.200</b>	<b>(1.117.722.050)</b>
	3.1.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.083.750.250	966.028.200	(1.117.722.050)
4. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	<b>4.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>15.582.556.713</b>	<b>13.446.867.554</b>	<b>(2.405.689.159)</b>
	4.1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	179.970.200	176.422.400	(3.547.800)
	4.1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.926.365.588	8.571.636.684	(1.354.728.904)
	4.1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.000.000	20.000.000	(22.000.000)
	4.1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	993.317.000	858.860.950	(134.456.050)
	4.1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.948.921.300	1.141.930.500	(806.990.800)
	4.1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.078.934.625	2.140.189.820	61.255.195
	4.1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	683.048.000	537.827.200	(145.220.800)
<b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b>		<b>27.864.866.313</b>	<b>22.029.055.504</b>	<b>(5.835.810.809)</b>

Sumber : DPPA Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

## **2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

## **2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya.

### 2.5.1 Perjanjian Kinerja 2025 (Induk)

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi	%	17,74%	Triwulan I	4,44 %
					Triwulan II	4,44 %
					Triwulan III	4,44 %
					Triwulan IV	4,44 %
2.	Meningkatnya Pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM	%	0,56%	Triwulan I	0,14%
					Triwulan II	0,14%
					Triwulan III	0,14%
					Triwulan IV	0,14%
3.	Meningkatnya Kualitas SDM KUKM	Persentase SDM KUKM yang terlatih	%	0,390%	Triwulan I	0,098%
					Triwulan II	0,098%
					Triwulan III	0,098%
					Triwulan IV	0,098%
4.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	78,05	Triwulan I	19,5%
					Triwulan II	19,5%
					Triwulan III	19,5%
					Triwulan IV	19,55%

**Tabel II.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1	Persentase Pertumbuhan Koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	49.898.350	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	74.997.700	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	157.999.900	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	717.101.700	
2	Persentase pertumbuhan UKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.879.958.800	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	5.048.602.900	
3	Persentase SDM KUKM yang Terlatih	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.083.750.250	
4	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.582.556.713	

### 2.5.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 melaksanakan rewiu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena dengan dikeluarkannya Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/191/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 yaitu “agar memenuhi melakukan perbaikan indikator kinerja menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya”, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom sasaran dan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut :

**Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja	Persentase pertumbuhan koperasi	%	7,25	TW I	1,81
					TW II	1,81
					TW III	1,81
					TW IV	1,81
		Persentase pertumbuhan UKM	%	28,20	TW I	7,05
					TW II	7,05
					TW III	7,05
					TW IV	7,05
		Persentase SDM KUKM yang berkualitas	%	0,152	TW I	0,038
					TW II	0,038
					TW III	0,038
					TW IV	0,038
2.	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (DKUKM)	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah (DKUKM)	Nilai	78,10	TW I	19,525
					TW II	19,525
					TW III	19,525
					TW IV	19,525

**Tabel II.7 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1	Persentase pertumbuhan koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	31.020.900	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	45.286.500	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	30.685.050	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	642.655.350	
2	Persentase pertumbuhan UKM	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.335.970.350	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.530.541.600	
3	Persentase SDM KUKM yang terlatih	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	966.028.200	
4	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.446.867.554	

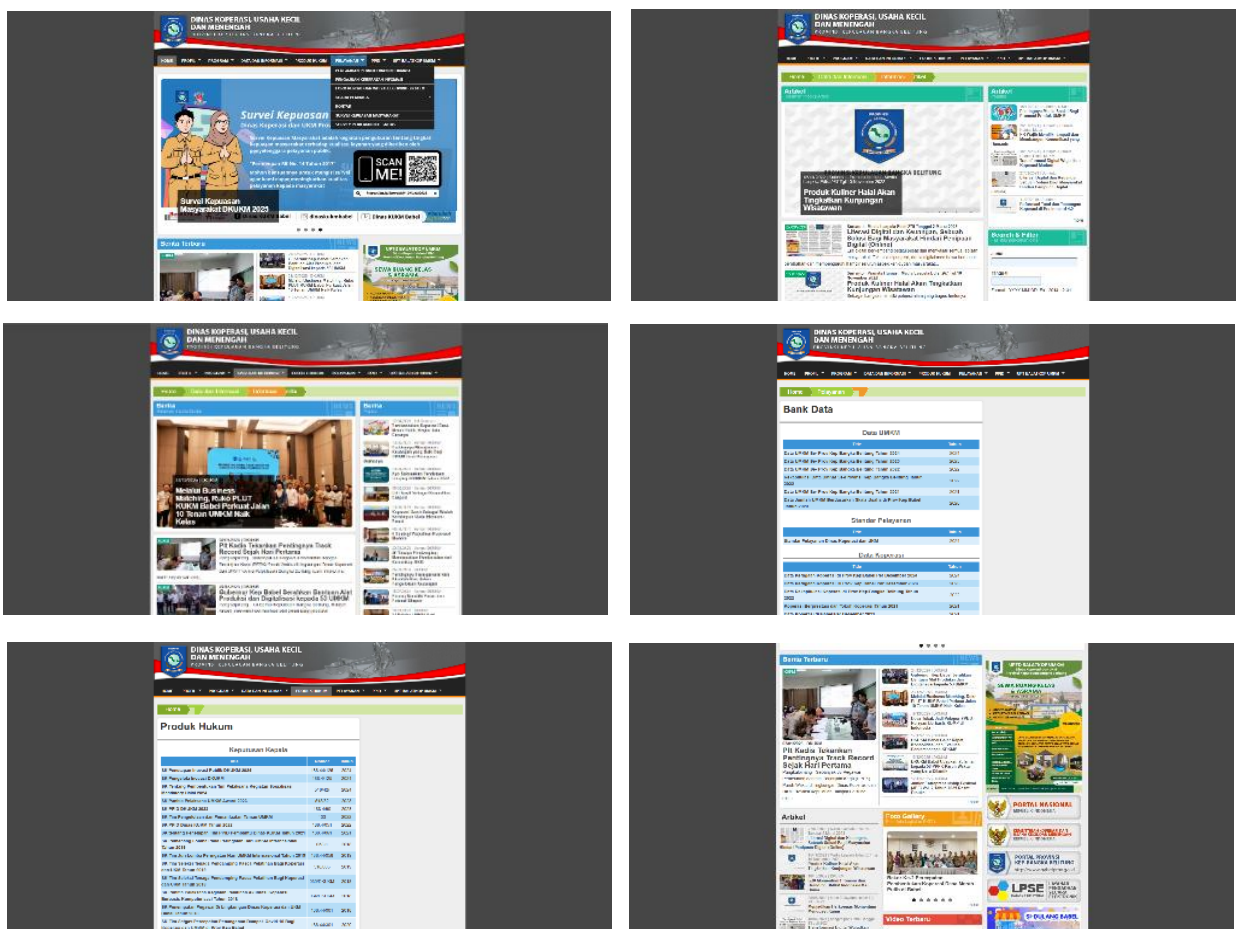
Keterangan Tambahan :

1. Perubahan target Kinerja tahun 2025 untuk sasaran kinerja Persentase pertumbuhan koperasi dari 17,74% menjadi 7,25%, dan Persentase SDM KUKM yang berkualitas dari 0,390% menjadi 0,152% dilakukan karena adanya refocusing anggaran sebesar Rp. 2.309.182.149,- atau 10,48% dan tagging anggaran mandiri sebesar Rp. 1.837.153.488,- atau 15%. Sedangkan untuk perubahan sasaran kinerja Persentase pertumbuhan UKM dari semula 0,56% berubah menjadi 28,20% karena melaksanakan tindak lanjut evaluasi dari Kementerian PANRB dimana target kinerja tahun 2025 sebesar 0,56% lebih kecil dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 28,10%, sehingga target perlu diubah menjadi lebih tinggi dari capaian.
2. Mengelola anggaran dekonsentrasi, yaitu:
  - 2.1. Program Perkoperasian : Rp. 3.973.188.000,-

## 2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat <https://kukm.babelprov.go.id/>. Di dalam website ini memuat profil lengkap beserta tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga menu untuk pengaduan, pelayanan masyarakat, dan prosedur pelayanan masyarakat yang dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti Pengajuan Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan Informasi, Form Pengaduan *Whistleblowing System*, Surat Pembaca, Kontak, Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Penilaian Integritas.

Gambar II.1. Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



## BAB 3

# Akuntabilitas Kinerja

### **Bab 3 Berisi :**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2025*
2. *Efisiensi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Penghargaan*
5. *Lintas Sektor/Crosscutting*

### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025**

Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja	Persentase Pertumbuhan Koperasi	%		3,33	7,25	8,06	111,23		17,25%
		$\frac{(\text{Jumlah Koperasi Tahun 2025} - \text{Jumlah Koperasi Tahun 2024}) \times 100\%}{\text{Jumlah Koperasi Tahun 2024}}$								
		Persentase Pertumbuhan UKM	%		28,11	28,20	28,25	100,17		0.61%
		$\frac{(\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2025} - \text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2024}) \times 100\%}{\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2024}}$								
		Persentase SDM KUKM yang Terlatih	%		0,325	0,152	0,156	102,86		0,369%
		$\frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang bersertifikat} \times 100\%}{\text{Jumlah SDM KUKM seluruhnya}}$								
4	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah (DKUKM)	%		81,06	78,10				78,85
		Nilai Raport Kinerja Daerah								

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### 3.1.1. Sasaran Kinerja : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi

Kinerja sasaran kesatu yaitu meningkatnya pertumbuhan Koperasi diukur dengan indikator Persentase Pertumbuhan Koperasi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi	$\frac{(\text{Jumlah Koperasi Tahun 2025} - \text{Jumlah Koperasi Tahun 2024}) \times 100\%}{\text{Jumlah Koperasi Tahun 2024}}$

Kinerja sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Persentase Pertumbuhan Koperasi. Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah **8,06%** atau sebesar 111,23% dari target **7,25%**. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

NO	INDIKATOR/FORMULA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	Persentase pertumbuhan koperasi	7,25%	8,06%	111,23%
	$\frac{(\text{Jumlah Koperasi Tahun 2025} - \text{Jumlah Koperasi Tahun 2024}) \times 100\%}{\text{Jumlah Koperasi Tahun 2024}}$			
	Jumlah Koperasi Tahun 2024			

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 8,06%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 111,23 % terlampaui.
- b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 3,33% (data Lkj Tahun lalu) indikator

sasaran Persentase Pertumbuhan Koperasi mengalami peningkatan sebesar 241,94% capaian tahun ini dikurang % capaian tahun lalu.

c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. **Program Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam** dengan sasaran program meningkatnya Koperasi simpan pinjam yang difasilitasi mempunyai Indikator persentase izin usaha simpan pinjam yang difasilitasi dengan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah izin usaha simpan pinjam yang difasilitasi dibagi jumlah koperasi simpan pinjam yang ada dikali seratus persen. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  $(6/73) \times 100\% = 8,22\%$  dari target 5 KSP atau dengan persentase capaian sebesar 3%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 2,74% (persentase capaian tahun lalu).

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut :

- Meningkatkan keinginan masyarakat untuk membentuk koperasi
- Koordinasi dan kolaborasi Pemerintah Daerah dan pusat dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Kabupaten Kota dan Kementerian Koperasi dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi urusan koperasi

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Memperbanyak sosialisasi ke masyarakat untuk lebih memanfaatkan koperasi
- Meningkatkan pengawasan kepada KSP/USP yang ada

2. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** dengan sasaran program meningkatnya Koperasi yang diawasi dan diperiksa mempunyai Indikator persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi dibagi jumlah koperasi Provinsi dikali seratus persen Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  $(34/134) \times 100\% = 25,37\%$  dari target 33 koperasi atau dengan persentase capaian sebesar 25%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 22,39% (capaian tahun lalu).

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut :

- Koordinasi dan kolaborasi Pemerintah Daerah dan pusat dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Kabupaten Kota dan Kementerian Koperasi dalam melakukan pembinaan dan

fasilitasi urusan koperasi

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan volume kunjungan ke koperasi baik secara langsung atau melalui telpon/WA
- Menambah anggaran belanja pengawasan koperasi

3. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi** dengan sasaran program meningkatnya Koperasi yang sehat mempunyai Indikator Persentase Koperasi yang sehat formula perhitungan indikator ini adalah jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi Provinsi dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah  $(12/73) \times 100\% = 16,44\%$  dari target 9 atau dengan persentase capaian sebesar 12%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 10,96% (capaian tahun lalu).

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut :

- Meningkatnya keinginan masyarakat untuk membentuk koperasi
- Koordinasi dan kolaborasi Pemerintah Daerah dan pusat dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Kabupaten Kota dan Kementerian Koperasi dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi urusan koperasi

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Memperbanyak sosialisasi ke masyarakat untuk lebih memanfaatkan koperasi
- Meningkatkan pengawasan kepada KSP/USP yang ada

4. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** dengan sasaran program meningkatnya Koperasi yang diberdayakan mempunyai Indikator Persentase Koperasi yang diberdayakan formula perhitungan indikator ini adalah jumlah koperasi yang diberdayakan dibagi jumlah koperasi Provinsi dikali 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 6,72%. (capaian tahun lalu).

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut :

- Meningkatnya keinginan masyarakat untuk membentuk koperasi
- Koordinasi dan kolaborasi Pemerintah Daerah dan pusat dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Kabupaten Kota dan Kementerian Koperasi dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi urusan koperasi.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Memperbanyak sosialisasi ke masyarakat untuk lebih memanfaatkan koperasi
- Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi kepada koperasi yang ada

**3.1.1.1. Data Dukung Capaian Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi** melalui Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program pelayanan izin usaha simpan pinjam melekat pada Bidang Koperasi dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 31.020.900,-

**Gambar III.1 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Pelaksanaan kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam (uji kelayakan dan kepatutan bagi pengurus dan pengawas koperasi). Diikuti sebanyak 32 orang peserta yang merupakan pengurus dan pengawas KSP/USP
2.		Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan pembentukan koperasi yang bertujuan memperkuat legalitas serta tata kelola ekonomi masyarakat secara profesional.

**3.1.1.2. Data Dukung Capaian Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi** melalui Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi melekat pada Bidang Koperasi dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 32.686.600,-
- b. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 12.599.900,-

**Gambar III.2 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang ada di Kabupaten/Kota. Kegiatan pengawasan rutin bertujuan mengevaluasi legalitas serta kepatuhan pengurus dalam menjalankan fungsi organisasi secara transparan.
2.		

**Gambar III.3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan KSP/USP yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan rutin bertujuan untuk mengevaluasi legalitas serta kepatuhan pengurus KSP/USP dalam menjalankan fungsi organisasi secara transparan.</p>
2.		<p>Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan KSP/USP yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan rutin bertujuan untuk mengevaluasi legalitas serta kepatuhan pengurus KSP/USP dalam menjalankan fungsi organisasi secara transparan.</p>

**3.1.1.3. Data Dukung Capaian Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi** melalui Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi melekat pada Bidang Koperasi dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 30.685.050,-.

**Gambar III.4 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang dilaksanakan di Koperasi yang ada di Kabupaten/Kota. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mendeteksi dini risiko operasional, memastikan transparansi tata kelola, serta meningkatkan kepercayaan anggota melalui laporan kinerja yang akurat sesuai standar perkoperasian nasional.</p>
2.		

**3.1.1.4. Data Dukung Capaian Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi** melalui Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi melekat pada Bidang Koperasi dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 642.655.350,-

**Gambar III.5 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Fasilitasi Akta Koperasi Merah Putih mencakup 393 koperasi desa dan kelurahan yang seluruhnya resmi bernetaris.</p>
2.		<p>Rapat pembahasan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kepulauan Bangka Belitung bersama Tim Satgas.</p>

### 3.1.2. Sasaran Kinerja : Meningkatnya Pertumbuhan UKM

Kinerja sasaran kesatu yaitu meningkatnya pertumbuhan UKM diukur dengan indikator Persentase Pertumbuhan Koperasi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel III.5. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	Persentase pertumbuhan UKM	$\frac{(\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2025} - \text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2024}) \times 100\%}{\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2024}}$

Kinerja sasaran Meningkatnya Pertumbuhan UKM diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Persentase Pertumbuhan UKM. Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah **28,25%** atau sebesar **100,17% dari target 28,20%**. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.6. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

NO	INDIKATOR/FORMULA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	Persentase pertumbuhan UKM	28,20%	28,25%	100,17%
	$\frac{(\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2025} - \text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2024}) \times 100\%}{\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2024}}$			
	Jumlah Usaha Kecil Tahun 2024			

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan UKM adalah sebagai berikut:

- Tercapai 28,25, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 28,20 % terlampaui.
- Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 28,11% (data Lkj Tahun lalu) indikator sasaran Persentase Pertumbuhan UMKM mengalami peningkatan sebesar 100,48% capaian tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu)
- Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)** dengan sasaran program Pemberdayaan UMKM mempunyai Indikator Persentase UMKM yang Diberdayakan dengan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah usaha kecil yang diberdayakan Tahun 2025 dibagi Jumlah Usaha Kecil Tahun 2025 di kali seratus persen. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  $(273/4949) \times 100\% = 5,52\%$  dari target 223 UKM atau dengan persentase capaian sebesar 4,5%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 4,30% (capaian tahun lalu).

**Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut :**

- Meningkatnya jumlah pelaku UMKM
- Kolaborasi yang baik dengan dinas kabupaten Kota dan Kementerian UMKM dalam pembinaan dan fasilitasi UMKM

**Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :**

- Terus meningkatkan pembinaan dan fasilitasi UMKM terutama kepada masyarakat yang ingin membentuk UMKM

2. **Program Pengembangan UMKM** dengan sasaran program Meningkatnya Pengembangan Usaha Kecil mempunyai Indikator Persentase usaha kecil yang meningkat menjadi usaha Menengah dengan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Usaha Kecil yang dikembangkan dan difasilitasi/ Jumlah Usaha Kecil) x 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  $(6/4.949) \times 100\% = 0,12\%$  dari target 6 UKM atau dengan persentase capaian sebesar 0,12%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 0,11% (capaian tahun lalu).

**Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut :**

- Meningkatnya jumlah pelaku UMKM

**Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :**

- Terus meningkatkan pembinaan dan fasilitasi UMKM terutama kepada masyarakat yang ingin membentuk UMKM
- Kolaborasi yang baik dengan dinas kabupaten Kota dan Kementerian UMKM dalam pembinaan dan fasilitasi UMKM.

**3.1.2.1 Data Dukung Capaian Meningkatnya Pertumbuhan UKM melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) melekat pada Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan anggaran sebesar Rp 3.335.970.350,-.

**Gambar III.6 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Melaksanakan Pemetaan Kewirausaha bagi Universitas yang ada di Provinsi Bangka Belitung dan Sekolah Menengah Atas yang Di provinsi Bangka Belitung dimana para Mahasiswa dan siswa memiliki potensi untuk berwirausaha baik melalui Universitas/sekolah atau Mandiri.
2.		Melaksanakan sosialisasi fasilitasi sertifikasi halal bagi umkm mendapatkan sertifikat halal wajib mengikuti pelatihan penyelia halal sehingga dapat melanjutkan tahap mendapatkan sertifikat halal ke dalam aplikasi si halal.

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
3.		<p>Memberikan edukasi HAKI kepada UMKM agar mampu mendaftarkan merek orisinal pada aplikasi DJKI secara lancar hingga berhasil mendapatkan sertifikat resmi sebagai bentuk perlindungan hukum.</p>
4.		<p>Penyerahan Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi UMKM yang diwakili Oleh Perangkat Desa dan Kelurahan di 4 Kabupaten terdiri dari Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Belitung sebanyak 3.750 UMKM.</p>
5.		<p>Penyelenggaraan kegiatan penumbuhkembangan wirausaha dan inkubasi wirausaha bagi UMKM di hadiri Narasumber dari Unversitas Bangka Belitung dimana bagaimana cara berbinis yang baik di media Sosial agar para nasabah berminat untuk membeli atau bermitra.</p>
6.		<p>Melaksanakan monev dan pengendalian kewirausahaan bagi UMKM berharapan butuh dukung peran pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk mendorong usahanya naik kelas dalam pemasaran dan produksinya.</p>

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
7.		<p>Menyelenggarakan rapat pendataan pada Aplikasi Si Dulang babel dengan Koordinator Kabupaten/kota provinsi kepulauan bangka Belitung dan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Koordinator dan Operator Aplikasi Sidulang babel pada Dinas yang membidangi UMKM Kabupaten/Kota serta Operator kecamatan Se- Bangka Belitung</p>
8.		<p>Penguatan Kelembagaan Bagi UMKM dalam Penerbitan Nomor Induk berusaha ( NIB ) sebagai syarat memiliki Usaha.</p>
9.		<p>Penyelenggaraan Kemitraan Dinas KUKM Provinsi Kep. Babel dengan Dinas Kabupaten/Kota, Unversitas serta melakukan Monev dan pengendalian Kemitraan UMKM.</p>

### 3.1.2.2 Data Dukung Capaian Meningkatnya Pertumbuhan UKM melalui Program Pengembangan UMKM

Program Pengembangan UMKM melekat pada Bidang Pengembangan Usaha Kecil dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dngan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah dengan anggaran sebesar Rp 3.530.541.600,-.

**Gambar III.7 Program Pengembangan UMKM Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dngan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah**

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Penyerahan bantuan alat pendukung produksi, digitalisasi, dan pemasaran kepada 53 pelaku UMKM</p>
2.		<p>Kegiatan Sosialisasi “KUR Goes to Desa” ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertujuan membuka akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku UMKM khususnya di wilayah pedesaan</p>
3.		<p>Kegiatan Promosi dan Pemasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kegiatan tersebut bertujuan memperluas jejaring bisnis serta pasar UMKM Bangka Belitung agar mampu bersaing secara global</p>
4.		<p>Program Gempur melibatkan mahasiswa untuk mendampingi UMKM desa guna pemerataan akses KUR pada berbagai sektor produktif serta membangun jiwa kewirausahaan para Mahasiswa</p>

### 3.1.3. Sasaran Kinerja : Meningkatnya Kualitas SDM KUKM

Kinerja sasaran kesatu yaitu meningkatnya kualitas SDM KUKM diukur dengan indikator Persentase SDM KUKM yang terlatih. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel III.7. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas SDM KUKM	Persentase SDM KUKM yang terlatih	$\frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang bersertifikat} \times 100\%}{\text{Jumlah SDM KUKM seluruhnya}}$

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas SDM KUKM diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Persentase SDM KUKM yang terlatih. Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah **100%** atau sebesar **103,09% dari target 97%**. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.8. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

NO	INDIKATOR/FORMULA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	Persentase SDM KUKM yang terlatih	97%	100%	103,09%
	$\frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang bersertifikat} \times 100\%}{\text{Jumlah SDM KUKM seluruhnya}}$			

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya SDM KUKM yang Terlatih adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 100%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 97% % terlampaui.
- b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 100% (data Lkj Tahun lalu) indikator sasaran Persentase SDM KUKM yang terlatih pencapaiannya sama sebesar 100%.
- c. Dibandingkan dengan target akhir Renstra, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan sasaran program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian mempunyai Indikator Persentase SDM Koperasi dan UKM yang bersertifikat dengan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah SDM Koperasi dan UKM dan bersertifikat dibagi Jumlah SDM Koperasi dan UKM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dikali seratus persen. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  $(200/200) \times 100\% = 100\%$  dari target 194 orang atau dengan persentase capaian sebesar 97%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 100% (capaian tahun lalu).

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut :

- Tingginya antusiasme pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan
- Tersediaanya sarana, prasarana dan SDM instruktur pelatihan yang mumpuni

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Tetap menjaga mutu pelaksanaan pelatihan koperasi

#### **3.1.3.1 Data Dukung Capaian Meningkatnya Kualitas SDM KUKM yang Terlatih melalui Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian melekat pada UPTD Balai Latihan KUKM dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 966.028.200,-.

**Gambar III.8 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Kegiatan Audit resertifikasi ISO 9001:2015 menjadi bukti konsistensi UPTD Balatkop dan UKM dalam menjamin standar kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan
2.		Kegiatan Pelatihan bagi para Pengurus koperasi dan Pelaku UMKM selama Tahun 2025. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi, kualitas produk, serta profesionalisme tata kelola koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.		Kegiatan Sertifikasi bagi para pengurus koperasi dan fasilitator pendamping UMKM. Sertifikasi BNSP memberikan pengakuan resmi terhadap kompetensi profesi untuk menjamin standar kualitas kerja yang profesional.
4.		

### 3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya pertumbuhan koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi	7,25%	8,06%	111,23%	749.647.800	178.286.381	23,78%	571.361.419
2.	Meningkatnya pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM	28,20%	28,25%	100,17%	6.866.511.950	4.313.161.216	61,81%	2.553.350.734
3.	Meningkatnya kualitas SDM KUKM	Persentase SDM KUKM yang berkualitas	0,152%	0,156%	102,86%	966.028.200	865.736.140	89,62%	100.292.060
4.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah	78,05			13.446.867.554	11.282.535.802	92,00%	2.164.331.752
Total Belanja						22.029.055.504	16.639.719.539	75,54%	5.389.335.965

**Sumber:** *http:SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2025, Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025*

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2025 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 22.029.055.504, terealisasi Rp 16.639.719.539 atau 75,54% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 5.389.335.965 yang bersumber dari:

- Efisiensi Belanja Operasi
- Efisiensi Belanja Modal

### **3.3 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025**

Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : ..... perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2025 telah disusun Tindak lanjut adalah sebagai berikut :

**Tabel III.10 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025**

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAKLANJUT	TARGET	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN/OUTPUT	PELAKSANAAN				LINK BUKTI DUKUNG
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1										
2										
dst										

Mengetahui,  
Kepala.....  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

.....

NIP. ....

### 3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Si Dulang Babel, untuk memudahkan penyediaan data lengkap UMKM di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. UMKM Bangkit, sebagai gerakan pemberdayaan dan pengembangan UMKM mulai dari kelembagaan, pendataan, standarisasi produk dan pendampingan pelaku UMKM dan Koperasi
- d. Siwaskop (Sistem Informasi dan Pengawasan Koperasi), yang terdiri dari sistem informasi seputar data dan kegiatan koperasi, kesehatan koperasi dan pemberdayaan koperasi.
- e. Gempur (Gerakan Mahasiswa Pendamping KUR), sebagai upaya Dinas Koperasi dan UKM dalam menggalakan KUR dengan melibatkan mahasiswa UBB
- f. Jelang seven (Jemput Pelanggan di *Special Event*), sebagai upaya Dinas Koperasi dan UKM dalam meningkatkan promosi produk UMKM melalui *event* bazar pada hari-hari besar nasional.
- g. KUR Goes to Desa, upaya Dinas Koperasi dan UKM dalam meningkatkan penyerapan dan pemanfaatan KUR, khususnya untuk UMKM di kecamatan dan desa.

### 3.5 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. Penghargaan Mitra Kerja dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung yang telah bekerjasama dalam Sosialisasi Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi Pelaku UMKM serta Menfasilitasi Pendaftaran Merek bagi Pelaku UMKM pada tahun 2025.

### 3.6 Crosscutting

*Cross cutting* adalah penjabaran dari instansi atau Perangkat Daerah mana saja yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan program kerjanya.

# BAB 4

## Penutup

### **Bab 4 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi*
3. *Rencana Aksi*

### **4.1 Kesimpulan**

Hasil laporan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 4 (empat) sasaran, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur dan 1 (satu) sasaran merupakan indikator kinerja rutin dinas. Pada tahun 2025, indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Koperasi tercapai dengan presentase 111,23%, indikator kinerja Persentase Pertumbuhan UKM tercapai dengan presentase 100,17%, indikator kinerja Persentase SDM KUKM yang berkualitas tercapai dengan presentase 102,86%.
2. Sedangkan untuk keberhasilan tercapainya kinerja tidak lepas dari tersedianya data teknis untuk bahan penentuan sasaran, tersedianya SDM yang berkualitas dan anggaran terkait (walaupun di refocusing) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan serta kerja sama yang baik dengan instansi sosial kab/kota, masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan serta partisipasi yang besar dari semua pihak untuk mendukung program kegiatan Dinas Koperasi dan UKM dalam upaya mendukung kinerja Kepala daerah.

### **4.2 Rekomendasi**

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas data Koperasi dan UMKM yang tersedia, karena data UMKM yang ada sekarang kurang maksimal untuk digunakan dalam menentukan kebijakan.
2. Perlunya peninjauan kembali relevansi pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota dalam pembinaan UMKM, karena dengan keluarnya PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM terjadi perubahan kriteria usaha mikro, kecil, menengah dan besar.

3. Memaksimalkan implementasi Perda/Pergub Kepulauan Bangka Belitung yang mendukung kinerja Dinas dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan
4. Pemerintah, LSM, swasta dan stakeholders harus lebih meningkatkan kerja sama dalam penyadaran hak-hak difabel melalui banyak media seperti, diskusi, workshop, media massa ataupun fasilitas web. Penyedia layanan transportasi.
5. publik juga perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi yang aksesibel dan ramah difabel.
6. Memaksimalkan peran Koperasi dan Komunitas UMKM dan instansi pemerintah serta melibatkan masyarakat dalam hal Pengembangan Koperasi dan UMKM di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **4.3 Rencana Aksi**

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif antara Dinas Koperasi dan UKM dengan Dinas terkait, Pemerintah Kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat.
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran yang tepat sasaran
4. Penguatan kapasitas SDM di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah (DKUKM)	78.00	78.05	78.10	78.15
2	Meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja	Persentase pertumbuhan koperasi	17.65%	17,70%	7,25%	17,95%
			Persentase pertumbuhan UKM	0.53%	0.55%	28,20%	0.58%
			Persentase SDM KUKM yang berkualitas	0.304	0.315	0,152%	0.369

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Pulau Lepar No. 06, Komplek Perkantoran Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam  
Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, Telp./Fax (0717) 421743  
Web : kum.babelprov.go.id Email : kum@babelprov.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS KOPERASI DAN UKM

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
VISI PERANGKAT DAERAH : --  
MISI PERANGKAT DAERAH : --  
TUJUAN PERANGKAT DAERAH : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN KOPERASI DAN UKM UNTUK  
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Formula Penghitungan Target
			Awal	Perubahan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah	78,10%	78,10%	Penilaian Rapor Kinerja Perangkat Daerah
2.	Meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja	Persentase pertumbuhan koperasi	17,80%	7,25%	$\frac{\text{Jumlah Koperasi (t)} - \text{Jumlah koperasi (t-1)}}{\text{Jumlah koperasi (t-1)}} \times 100\%$
		Persentase pertumbuhan UKM	0,56%	28,20%	$\frac{\text{Jumlah Usaha Kecil (t)} - \text{Jumlah Usaha Kecil (t-1)}}{\text{Jumlah Usaha Kecil (t-1)}} \times 100\%$
		Persentase SDM KUKM yang berkualitas	0,325%	0,152%	$\frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang bersertifikat}}{\text{Jumlah SDM KUKM seluruhnya}} \times 100\%$

Pit. Kepala Dinas  
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Arie Primajaya, SE, MM  
Pembina TK I  
NIP. 19751231 200312 1 007

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Induk)

  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD YANI, SE., M.Si., Ph.D  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


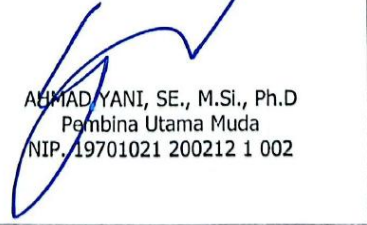
Nama : SUGITO  
Jabatan : Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2025

<p>PIHAK KEDUA Pj. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</p>  SUGITO	<p>PIHAK PERTAMA Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</p>  AHMAD YANI, SE., M.Si., Ph.D Pembina Utama Muda NIP. 19701021 200212 1 002
---	---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah	78,10%	Penilaian Rapor Kinerja Perangkat Daerah
2.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja	Persentase pertumbuhan koperasi	17,74%	$\frac{\text{Jumlah Koperasi (t)} - \text{Jumlah koperasi (t-1)}}{\text{Jumlah koperasi (t-1)}} \times 100 \%$
		Persentase pertumbuhan UKM	2,0%	$\frac{\text{Jumlah Usaha Kecil (t)} - \text{Jumlah Usaha Kecil (t-1)}}{\text{Jumlah Usaha Kecil (t-1)}} \times 100 \%$
		Persentase SDM KUKM yang Berkualitas	0.390%	$\frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang bersertifikat}}{\text{Jumlah SDM KUKM seluruhnya}} \times 100 \%$

Anggaran :

No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Dinas)	15.852.556.713,-	
2.	Persentase pertumbuhan koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	49.898.350,-	
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	74.997.700,-	
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	157.999.900,-	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	717.101.700,-	

No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Persentase pertumbuhan UKM	Program Pemberdayaan UMKM	3.879.958.800,-	
		Program Pengembangan UMKM	5.048.602.900,-	
4.	Persentase SDM KUKM yang terlatih	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	2.083.750.250,-	


Pangkalpinang, Januari 2025

PIHAK KEDUA  
Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SUGITO

PIHAK PERTAMA  
Plt. KEPALA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



AHMAD YANI, SE., M.Si., Ph.D  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701021 200212 1 002

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 disertai dengan Berita Acara

  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIE PRIMAJAYA, SE., M.Si  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HIDAYAT ARSANI  
Jabatan : Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2025

<p>PIHAK KEDUA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</p>  HIDAYAT ARSANI	<p>PIHAK PERTAMA Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</p>  ARIE PRIMAJAYA, SE., M.Si Pembina Tk. I NIP. 19751231 200312 1 007
---	---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELTUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah	78,10%	Penilaian Rapor Kinerja Perangkat Daerah	1.	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah	78,10%	Penilaian Rapor Kinerja Perangkat Daerah
2.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja	Persentase pertumbuhan koperasi	17,74%	$\frac{(\text{Jumlah Koperasi (t)} - \text{Jumlah Koperasi (t-1)})}{\text{Jumlah Koperasi (t-1)}} \times 100\%$	2.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja	Persentase pertumbuhan koperasi	7,25%	$\frac{(\text{Jumlah Koperasi (t)} - \text{Jumlah Koperasi (t-1)})}{\text{Jumlah Koperasi (t-1)}} \times 100\%$

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase pertumbuhan UKM	28,20%	$\frac{(\text{Jumlah Usaha Kecil (t)} - \text{Jumlah Usaha Kecil (t-1)})}{\text{Jumlah Usaha Kecil (t-1)}} \times 100\%$			Persentase pertumbuhan UKM	28,20%	$\frac{(\text{Jumlah Usaha Kecil (t)} - \text{Jumlah Usaha Kecil (t-1)})}{\text{Jumlah Usaha Kecil (t-1)}} \times 100\%$
		Persentase SDM KUKM yang Berkualitas	0,390%	$\frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang bersertifikat}}{\text{Jumlah SDM KUKM seluruhnya}} \times 100\%$			Persentase SDM KUKM yang Berkualitas	0,152%	$\frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang bersertifikat}}{\text{Jumlah SDM KUKM seluruhnya}} \times 100\%$

Anggaran :

No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase pertumbuhan koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp 31.020.900,-	
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 45.286.500,-	
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp 30.685.050,-	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 642.655.350,-	
2.	Persentase pertumbuhan UKM	Program Pemberdayaan UMKM	Rp 3.335.970.350,-	
		Program Pengembangan UMKM	Rp 3.530.541.600,-	
3.	Persentase SDM KUKM yang terlatih	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp 966.028.200,-	

Anggaran Penunjang (Kesekretariatan) :

No (1)	Indikator Kinerja (2)	Program (3)	Anggaran (4)	Keterangan (5)
1.	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Dinas)	Rp 13.446.867.554,-	

Pangkalpinang, November 2025

PIHAK KEDUA  
GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



HIDAYAT ARSANI

PIHAK PERTAMA  
PIL. KEPALA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



ARIE PRIMAJAYA, SE., M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19751231 200312 1 007

*Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 1 Tahun 2025*

*scan Laporan Monev Rencana Aksi TW 1 Tahun 2025*

*Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 2 Tahun 2024*

*scan Laporan Monev Rencana Aksi TW 2 Tahun 2025*

*Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 3 Tahun 2025*

*scan* Laporan Monev Rencana Aksi TW 3 Tahun 2025

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 4 Tahun 2025

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH TW IV TAHUN 2025																													
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Sasaran Program (PK Ess 3/ Fungsional)	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)																
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah (CN/UKM)	78.10	78.10	Program 1 :	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.05	78.05	Kegiatan 1 :	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	21 Laporan	21 Lap																
				TW I	19.50			19.50	TW I			19.50	19.50	TW I	5 Lap	5 Lap													
				TW II	39.00			39.00	TW II			39.00	39.00	TW II	12 Lap	12 Lap													
				TW III	58.50			58.50	TW III			58.50	58.50	TW III	16 Lap	16 Lap													
				TW IV	78.10			78.10	TW IV			78.05	78.05	TW IV	21 Lap	21 Lap													
				2	Meningkatnya Pencapaian Lapangan Kerja pada Sektor Koperasi dan UKM			Meningkatnya Pencapaian Lapangan Kerja pada Sektor Koperasi dan UKM	Persentase pertumbuhan koperasi			7.25%	8.06%	Program 2 :	Persentase izin Usaha Simpan yang dikeluarkan	3.00%	6.22%	Kegiatan 1 :	Jumlah jenis BMD yang dipelihara	4 Laporan	4 Lap								
												TW I	1.45%			1.26%	TW I			0	0	TW I	0	0					
												TW II	2.05%			2.50%	TW II			1%	1%	TW II	1 Koperasi	1 Koperasi					
												TW III	2.5%			2.50%	TW III			1%	3.50%	TW III	2 Koperasi	2 Koperasi					
												TW IV	1.25%			0.81%	TW IV			1%	3.72%	TW IV	2 Koperasi	3 Koperasi					
												3	Meningkatnya Koperasi yang diakui dan diperkasa			Persentase Koperasi yang diakui dan diperkasa	Persentase Koperasi yang diakui dan diperkasa			25.00%	25.37%	Program 3 :	Persentase Koperasi yang diakui dan diperkasa	6%	3%	Kegiatan 1 :	Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi yang	20 Koperasi	21 Koperasi
																				TW I	6%			3%	TW I			5 Koperasi	2 Koperasi
																				TW II	12%			10%	TW II			5 Koperasi	5 Koperasi
																				TW III	18%			10%	TW III			5 Koperasi	4 Koperasi
TW IV	25%	2.37%	TW IV			5 Koperasi	10 Koperasi																						
4	Meningkatnya Koperasi yang sehat	Persentase Koperasi yang sehat	Persentase Koperasi yang sehat			12%	16.44%			Program 4 :	Persentase Koperasi yang sehat									3%	3%			Kegiatan 1 :	Jumlah Revisi Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Pengingatannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			15 Koperasi	17 Koperasi
						TW I	3%													3%	TW I							3 Koperasi	3 Koperasi
						TW II	6%													5%	TW II							3 Koperasi	2 Koperasi
						TW III	9%													8%	TW III							4 Koperasi	3 Koperasi
				TW IV	12%	0.44%	TW IV	5 Koperasi	4 Koperasi																				

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Sasaran Program (PK Ess 3/ Fungsional)	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)																		
3			Peningkatan jumlah UKM		28,20%	28,20%	Meningkatnya Pembentukan terhadap UMKM	Persentase Usaha Kecil yang dibudayakan	7%	8,56%	Kegiatan 1 : Kegiatan Pemberdayaan dan Pendukung Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang dibudayakan yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9 Koperasi	11 Koperasi																	
															TW I	1,75%	0,50%	TW I	2 Koperasi	0											
															TW II	3,50%	2,50%	TW II	2 Koperasi	2 Koperasi											
															TW III	5,25%	3,50%	TW III	2 Koperasi	2 Koperasi											
															TW IV	7,00%	2,40%	TW IV	3 Koperasi	7 Koperasi											
															Program 5 :	4,90%	5,52%	Meningkatnya Pembentukan terhadap UMKM	Persentase Usaha Kecil yang dibudayakan	4,90%	5,52%	Kegiatan 1 : Terlaksananya Pembentukan Usaha Kecil yang dibudayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Pengiran, Penguatan Kemandirian dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang dibina dan dilindungi	1.016 Unit Usaha	4.125 unit usaha						
																										TW I	1,13%	0,29%	TW I	254 unit usaha	75 unit usaha
																										TW II	2,25%	1,25%	TW II	254 unit usaha	125 unit usaha
																										TW III	3,38%	2,25%	TW III	254 unit usaha	155 unit usaha
															TW IV	4,50%	1,77%	TW IV	254 unit usaha	3.970 unit usaha											
															Program 6 :	0,12%	0,12%	Meningkatnya Pengembangan Usaha Kecil	Persentase usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah	0,12%	0,12%	Kegiatan 1 : Kegiatan Pengembangan Usaha kecil dengan Operasi Peningkatan Usaha usaha kecil menjadi usaha menengah	Jumlah Usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah	4 UKM	5 UKM						
																										TW I	0,1%	0%	TW I	1 UKM	0
TW II	0,24%	0,02%	TW II	2 UKM	1 UKM																										
TW III	0,24%	0,08%	TW III	3 UKM	1 UKM																										
TW IV	0,24%	0,04%	TW IV	4 UKM	3 UKM																										
4			Peningkatan SDM KUMH yang berkualitas		0,152%	0,156%	Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan SDM Koperasi dan UKM yang berkualitas	Persentase SDM Koperasi dan UKM yang berkualitas	97%	100%	Kegiatan 1 : Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih	164 Orang	200 orang																	
															TW I	16,1%	8%	TW I	20 orang	30 orang											
															TW II	40%	15%	TW II	60 orang	80 orang											
															TW III	67%	25%	TW III	60 orang	80 orang											
															TW IV	97%	82%	TW IV	54 Orang	50 orang											

Pangalangan, Januari 2026  
 Pdt. Kepala Dinas  
 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

*(Signature)*  
 Nita Purabaya, SE, MM  
 Pembina TK, I  
 NIP. 91921211 200312 1 007

Lampiran 5. Dokumen LHE Akuntabilitas Tahun 2025

Scan Dokumen LHE Akuntabilitas Perangkat Daerah.....

*Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2025*

*Scan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2025*

Lampiran 7. Scan Piagam Penghargaan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



